

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengangkat judul “Kronisme Kapital dalam Investasi Proyek Reklamasi Teluk Benoa”. Alasan penulis mengangkat isu proyek reklamasi sendiri karena penulis melihat proyek ini memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan agama. Proyek Reklamasi Teluk Benoa sendiri didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Lebih lanjut peraturan ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Teluk Benoa, sekaligus menimbang dan memperhatikan perkembangan Kebijakan Strategis Nasional dan dinamika internal kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa sehingga diperlukan revitalisasi dalam bentuk reklamasi.

Kawasan Teluk Benoa berada di Wilayah Bali Selatan menjadi bagian dalam Kabupaten Badung yang lebih tepatnya berada diantara Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Sehingga, Kawasan Teluk Benoa menjadi potensi kawasan pusat perekonomian dalam sektor pariwisata khususnya di Bali Selatan. Kawasan Teluk Benoa sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelestarian lingkungan, fungsi kehidupan sosial – budaya - religiusitas, dan fungsi pusat perekonomian. Fungsi sebagai pelestarian lingkungan, Kawasan Teluk Benoa merupakan lahan konservasi dimana pinggiran teluk dikelilingi oleh hutan bakau Tahura Ngurah Rai dengan luas 1.394,50 hektare (Wardana 2017, 65). Selain itu, merupakan perairan semi tertutup yang difungsikan sebagai muara dari tujuh sungai<sup>1</sup>. Selanjutnya, fungsi secara sosial – budaya - religuistas bahwa Kawasan Teluk Benoa difungsikan oleh masyarakat adat untuk melakukan upacara Melasti<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tukad merupakan Bahasa Bali yang artinya sungai. Adapun ketujuh Tukad yang bermuara di Kawasan Teluk Benoa, yaitu : Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Tuban, Tukad Sama, Tukad Bualu, Tukad Loloan, Tukad Ngenjung dalam Jurnal Transformasi Sosial.

<sup>2</sup> Melasti merupakan upacara penyucian diri di pantai terdekat yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk menyambut Hari Raya Nyepi

Secara ekonomi, kawasan ini digunakan para nelayan untuk mencari ikan sekaligus memanfaatkan bonus pariwisata dengan menyewakan jasa perahu nelayan tradisional. Selain itu, dimanfaatkan oleh pengelola hotel disekitar Kawasan Teluk Benoa untuk menyediakan permainan wahana air seperti banana boat, buggy jumping, dsb.

Kawasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dalam sektor pariwisata atas kunjungan wisatawan (BPS 2018). Kawasan Teluk Benoa berada diantara kedua wilayah tersebut yang mana hal itu menjadikan kawasan ini strategis. Selain itu, penulis berasumsi bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu tersedianya fasilitas penginapan seperti hotel dan sarana transportasi yang mana menjadi kerangka ekonomi makro. Terkait fasilitas penginapan sendiri bahwa pada tahun 2016 tingkat hunian berada pada 63,38% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 3,37% atau berada pada 66,75% (BPS 2018). Selanjutnya, transportasi menjadi penting selain sebagai sarana beraktivitas sehingga prinsip efisiensi dapat terakomodasi, serta dapat mengatasi kesenjangan jarak sekaligus komunikasi antar wilayah.

Adapun letak Kawasan Teluk Benoa, di sisi bagian barat Kawasan Teluk Benoa terdapat Bandar Udara Internasional Ngurah Rai yang merupakan bandara tersibuk ketiga setelah Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Udara Juanda. Tercatat di tahun 2016 kunjungan wisatawan sebesar 5,07 juta orang, lalu di tahun 2017 kunjungan wisatawan sebesar 5,96 juta atau tumbuh sebesar 17,4 persen. Selain itu, adanya Jalan Tol Bali Mandara menjadikan sebuah konektivitas yang menghubungkan antar wilayah di Kawasan Teluk Benoa. Di sisi bagian utara Kawasan Teluk Benoa terdapat Pelabuhan Benoa yang pada tahun 2017 mendapat kunjungan sebesar 49 ribu wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar. Di tahun 2018 seharusnya kunjungan yang datang lebih banyak, namun adanya isu terkait dengan adanya erupsi Gunung Agung sekaligus isu bom di Surabaya berdampak pada jumlah kunjungan tersebut.

Jika dilihat potensi adanya kenaikan kunjungan dari tahun ke tahun pada Pelabuhan Benoa sendiri menjadikan nilai tawar lebih bagi pariwisata di Bali.

Kawasan Teluk Benoa sendiri juga dipenuhi dengan hotel dan watersport, seperti : Mantra Sekala Resort, Novotel Bali Benoa, Grand Mirage Resort, Batara Dive & Watersport<sup>3</sup>. Nilai ekonomi yang dimiliki Teluk Benoa sendiri tak terlepas dari beberapa kontradiksi terkait dengan Proyek Reklamasi sendiri. Ada beberapa permasalahan yang muncul atas potensi ekonomi yang dimiliki Kawasan Teluk Benoa yaitu kerusakan lingkungan. Reklamasi dikhawatirkan dapat merusak fungsi Teluk Benoa sebagai *reservoir* (tampung banjir) dari beberapa aliran sungai<sup>4</sup>.

Sehingga akan berdampak pada banjir dan tergenangnya beberapa wilayah seperti di Sanur kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai dan dataran rendah sekitarnya. Selain itu, dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove di sekitar Teluk Benoa. Dan kekhawatiran terburuk yang terakhir adalah ancaman abrasi bahkan potensi tsunami dan liquifaksi<sup>5</sup> akibat reklamasi dengan pembuatan pulau baru. Proyek Reklamasi Teluk Benoa diawali dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bali No.1727/01-B/ HK/ 2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Dilanjutkan, dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 yang mana dalam poin Menimbang huruf B bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan menjadi Kawasan potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama.

Disusul dengan terbitnya Izin Lokasi Reklamasi (Badan Usaha) Nomor : 445/ MEN-KP/ VIII/ 2014 tentang pemberian Izin Reklamasi Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sebagai Pengembangan Kawasan Perekonomian (Pariwisata) seluas 700 Ha. Masa berlaku Izin Lokasi

---

<sup>3</sup> Dalam website resmi Tanjung Benoa “5 Hotel dan Resort Dekat Watersport Tanjung Benoa Bali” dalam <https://www.tanjungbenoa.co.id/5-hotel-resort-watersport-tanjung-benoa-bali/>, (diakses pada 11 Desember 2018).

<sup>4</sup> Dalam artikel online “Mengapa Kami Menolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali!!!” dalam <https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/>, (diakses pada 12 Desember 2018).

<sup>5</sup> Liquifikasi adalah hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat adanya faktor getaran, misalnya gempa bumi. Hal ini diasumsikan penulis akibat adanya pulau baru yang akan merusak kestabilan Kawasan Teluk Benoa dan bertentangan dengan prinsip adaptasi bencana.

dari 25 Agustus 2014 hingga 25 Agustus 2018. Selanjutnya, pada tanggal 12 April 2015 PT.TWBI diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 21/1/IP/PMDN/2015 atas rekomendasi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-69/M.EKON/ 04/ 2013 tanggal 12 April 2013 perihal persetujuan proyek pengembangan Kawasan Teluk Benoa sebagai kegiatan MP3EI kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional. Hal inilah yang nantinya menguatkan Proyek Reklamasi Teluk Benoa untuk kawasan pariwisata oleh PT.TWBI sebagai pengembang sekaligus pengelola. PT. TWBI berdomisili di Bali sejak tahun 2012 sebagai perusahaan yang memiliki fokus sebagai pengembang dan pengelola berlandaskan filosofi budaya dan kearifan lokal di Bali. PT. TWBI merupakan bagian dari Artha Graha Network (AGN) sekaligus memiliki jaringan perusahaan lain di bawah AG Network, seperti PT. Jakarta Internasional Hotels and Development Tbk (JIHD).

Proyek reklamasi ini merupakan inisiatif yang sejalan dengan iklim investasi global yang sedang tinggi. Tercatat pada tahun 2017 kondisi perekonomian global menjadi lebih kondusif yang berdampak pada stabilitas makro pertumbuhan ekonomi Indonesia<sup>6</sup>. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk meningkatkan investasi. Yang selanjutnya akan berkonsekuensi pada bagaimana negara (pemerintah) sebagai tuan rumah memberikan akses penyediaan dan peningkatan infrastruktur demi tercapainya peningkatan dalam berinvestasi. Namun, hal itu tidak lalu berjalan lancar begitu saja, bahwa nantinya akan menimbulkan permasalahan terkait masuknya investasi yang memunculkan banyak penentangan dari berbagai pihak terkait dengan dampak kerusakan lingkungan, stratifikasi sosial, dan pergeseran budaya. Selain itu, kesadaran masyarakat sipil dalam konteks demokratisasi menjadi hal yang penting dan harus menjadi perhatian. Sehingga, dalam hal ini pemerintah mengalami sebuah paradoks dalam pengembangan investasi dalam konteks demokratisasi yang semakin membawa masyarakat sipil pada tingkat kesadaran bahwa mereka juga memiliki peran.

---

<sup>6</sup> Dalam laporan khusus Bank Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017.

Fenomena-fenomena ini dapat diidentifikasi dalam proyek nasional yang dapat direpresentasikan dalam agenda kapitalisme, bahwa dalam hal ini pihak swasta mengalami beberapa kendala atas adanya campur tangan pemerintah terhadap proyek tersebut. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta misalnya, proyek yang diinisiasi sejak rezim orde baru, melalui Keputusan Presiden (Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Teluk Jakarta sendiri dianggap sebagai kawasan strategis di Indonesia, melihat letaknya merupakan di ibukota Indonesia. Kawasan Teluk Jakarta menjadi bagian dari Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga pengembangan atas Kawasan ini akan menggunakan pola pengembangan wilayah khusus yang bersifat menyeluruh akibat kompleksitas yang dimiliki kawasan tersebut. Pengembangan wilayah khusus tersebut menyangkut kegiatan konservasi, preservasi dan pengembangan<sup>7</sup>.

Awal mula reklamasi Teluk Jakarta masuk dalam pembahasan terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005 yang menyatakan perlunya dilakukan reklamasi dalam skala kecil mencakup Penjaringan, Pademangan, Ancol, Pluit (pantai Mutiara), yang dirasa memiliki urgensi atas peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan lahan yang peruntukannya untuk warga Jakarta yang semakin bertambah. Sehingga pembuatan 17 pulau di Teluk Jakarta dirasa menjadi penting. Dan pada tahun 1994, dikeluarkan Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI) 1994/95 – 1998/99. Dan pada tahun 1995 pemerintahan Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut dalam Perda tersebut menambahkan beberapa tujuan reklamasi yaitu perdagangan dan jasa internasional, perumahan bagi masyarakat menengah atas dan pelabuhan wisata.

Namun, pada tahun 2003 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan

---

<sup>7</sup> Dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis “Reklamasi Teluk Jakarta, Pelukah Dilanjutkan?” dalam Majalah Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI oleh Sri Nurhayati Qodriyatun.

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dalam kajiannya, reklamasi sendiri akan beresiko pada rusaknya ekosistem laut Kawasan utara, menurunkan penghasilan nelayan, dan terganggunya PLTU Muara Karang. Dalam proyek reklamasi sendiri ada beberapa badan usaha yang nantinya akan menjadi pelaksana sekaligus pengembang dari 17 pulau tersebut. Berikut adalah pembagian zonasi dan luas wilayah yang dimiliki badan usaha, meliputi: Sub Kawasan Barat (PT. Kapuk Naga Indah, PT. Jakarta Propetindo, PT. Muara Wisesa, PT. Taman Harapan Indah), Sub Kawasan Tengah (PT. Jaladri, PT. PJA, PT. MKY, PT. Pelindo), Sub Kawasan Timur (PT. Pelindo dan Pemprov DKI Jakarta).<sup>8</sup> Menindaklanjuti SK dari Kementerian Lingkungan Hidup yang melarang reklamasi tersebut, 6 pengembang reklamasi melakukan gugatan atas putusan KLH hingga keluar putusan dari MA yang memenangkan 6 gugatan pengembang pada tahun 2011.

Namun, perlu diketahui pada tahun 2008 dikeluarkannya Keppres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, yang mana lebih lanjut mengatur tentang perluasan reklamasi yang tidak hanya pada pesisir pantai utara namun juga perairan Teluk Jakarta dalam pulau-pulau buatan. Yang mana selanjutnya Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 yang memasukkan reklamasi 14 pulau di Teluk Jakarta. Lalu untuk aturan reklamasi di pantai utara ada pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang mencamtumkan 17 pulau yang diberi nama pulau A sampai pulau Q.

Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama menjadi pemerintahan yang dianggap paling antusias dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta sendiri. Pada tanggal 10 Juni 2014, ketika sembilan hari menjadi Pelaksana Teknis Tugas (PLT) Gubernur. Basuki Tjahaja Purnama mengambil sikap untuk menandatangani perpanjangan izin prinsip untuk pulau F, G, I, dan K yang

---

<sup>8</sup> Dalam Makalah Kebijakan “Selamatkan Teluk Jakarta” lebih lanjut dalam <http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2017/04/makalah-selamatkan-teluk-jakarta.pdf>. (diakses pada 12 Desember 2018).

kadaluarsa pada September 2013. Sebulan setelahnya Ahok juga mengeluarkan izin pelaksanaan pulau G untuk PT. Muara Wisesa Samudra kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land. Pada bulan Oktober dan November 2015, Basuki Tjahaja Purnama juga memberikan izin pelaksanaan kepada pulau F, H, I, dan K untuk PT. Jakarta Propetindo, PT. Harapan Indah, PT. Jaladri Kartika Pakci, dan PT. Pembangunan Jaya Ancol.<sup>9</sup>

Namun, dalam proses pelaksanaannya tidak begitu saja berjalan dengan lancar, bahwa terdapat dugaan indikasi kejanggalan dalam proses Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang lebih lanjut terkait Perencanaan Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K). Yang mana selanjutnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melalui perwakilannya Riza Danika menemukan indikasi bahwa rancangan Raperda RZWP3K diajukan hanya untuk melegitimasi praktik reklamasi di Teluk Jakarta dan selanjutnya merekomendasikan Komisi Pemeberatasan Korupsi untuk terus menyorotinya. Karena pengajuannya muncul setelah Pemprov DKI mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) menangkap Mohamad Sanusi sebagai Ketua Komisi D bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta dan mengamankan Trinanda Prihantono sebagai karyawan yang ditugaskan oleh direksi PT. Agung Podomoro Land untuk melakukan suap agar pengambilan keputusan untuk reklamasi dilancarkan.

Proyek nasional lainnya yang juga menjadikan swasta tidak dinamis yaitu Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek yang berlandaskan hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Proyek Kereta Cepat di Indonesia pada awalnya digagas era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pada tahun 2008 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diberi mandat. Yang mana berkaitan dengan pembuatan rancangan

---

<sup>9</sup> Dalam berita online “Beda Visi Ahok dan Anis Soal Reklamasi Teluk Jakarta” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180613173851-20-305939/beda-visi-ahok-dan-anies-soal-reklamasi-teluk-jakarta>. (diakses pada 13 Desember 2018).

proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya, sepanjang 700 km dan menunjuk Japan Internasional Corporation Agency (JICA) untuk melakukan riset dan kajian mendalam. Atas ide proyek kereta cepat pada era SBY tersebut, Jokowi berinisiatif untuk melanjutkannya. Namun, dengan beberapa perubahan rute akibat masuknya Tiongkok sebagai penantang Jepang saat diadakannya KTT APEC di Beijing 10-11 November 2014. Yang selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepemahaman Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Cina yang berbarengan dengan penandatanganan nota kesepemahaman Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina.

Proyek tersebut terlihat sebagai sebuah inisiasi dari masing-masing pemerintah (*Government-to-Government*), namun sebenarnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini direduksi ke dalam bentuk *business-to-business*. Hal ini terlihat dari PT. KCIC yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan BUMN dalam negeri dengan BUMN dari Tiongkok. PT. KCIC juga merupakan perusahaan operasional Jakarta-Bandung, dimana perusahaan ini yang menginisiasi konstruksi pembangunan, pembebasan lahan, operasional kereta cepat tersebut, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan berjalannya proyek kereta cepat tersebut. Sehingga dalam pembuatan megaprojek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta tidak bisa melancarkan investasinya sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah.

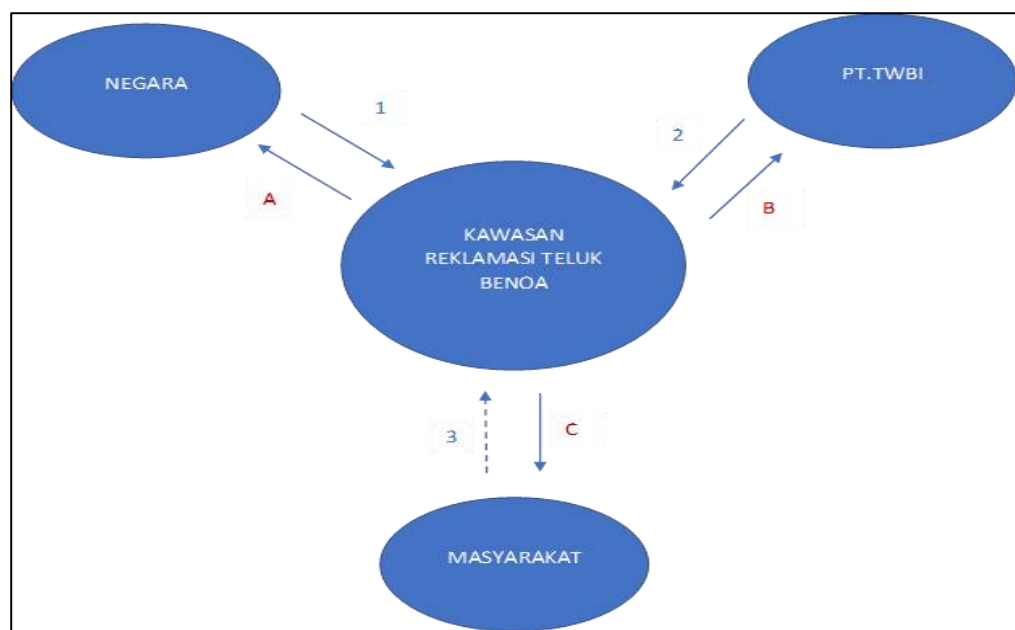
Kedua fenomena ini sama-sama menjelaskan bahwa negara ikut terlibat dalam proyek investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (*business-to-business*). Lebih lanjut lagi fenomena ini representatif sebagai pembanding dalam penelitian ini. Dalam topik yang penulis ambil yaitu tentang investasi Proyek Reklamasi Teluk Benoa bahwa pemerintah memiliki peran dalam proyek pembangunan yang diinisiasi oleh swasta. Dimana hal ini juga terjadi di dua fenomena yang penulis jelaskan sebelumnya. Bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang dominan sebagai aktor utama dalam proyek ini sehingga pemerintah memiliki jangkauan yang luas atas berjalannya proyek ini. Selain itu, kedua fenomena ini



juga menjelaskan bahwa negara (pemerintah) memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal ini teknologi, pendanaan investasi proyek, maupun sumber daya manusia.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara ekonomi atas pengelolaan penyediaan infrastruktur. Mendatangkan investasi menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi tersebut dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Lebih jauh lagi penulis ingin melihat bagaimana kerja investasi dalam konteks kapitalisme pada proyek reklamasi teluk benoa. Secara universal bahwa kapitalisme berjalan berdasarkan prinsip pasar bebas tanpa adanya intervensi dan berjalan secara dinamis. Namun, ada hal yang bertentangan secara kontekstual tentang prinsip adanya intervensi dari pemerintah atas proyek reklamasi Teluk Benoa ini menjadi berjalan tidak dinamis. Seperti: keluarnya beberapa keputusan yang menyatakan bahwa pemberian pengelolaan pada satu pihak, pemberian fasilitas, bahkan subsidi untuk melancarkan aktivitas tersebut.



Bagan 1.1 : Pola Hubungan Tiga Unsur Dalam

## Ekonomi Politik Yang Terbentuk Dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa

(Sumber : Diolah Penulis)

Bagan 1.1 menjelaskan bahwa teluk benoa difungsikan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan landaskan hukum Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Hal ini dilakukan pemerintah terkait beberapa urgensi atas dinamika perkembangan teluk benoa sendiri. Beberapa permasalahan pun muncul atas urgensi tersebut yang berkaitan atas pengelolaannya jika dilakukan oleh pemerintah. Tidak tersedianya anggaran, karena diperkirakan akan mengeluarkan banyak anggaran untuk memperbaiki kawasan Teluk Benoa. Serta, jika dalam hal ini pemerintah mengeluarkan anggaran hanya untuk perbaikan saja maka pemerintah akan mengalami kerugian yang cukup besar sekaligus berpengaruh pada anggaran belanja negara maupun daerah. Karena dalam hal ini tidak terjadi hubungan timbal balik atas aktivitas yang dilakukan yaitu revitalisasi kawasan Teluk Benoa. Sehingga, keterlibatan swasta dalam mengelola kawasan ini dianggap menjadi solusi untuk permasalahan yang muncul.

Adapun keterkaitan dengan pola hubungan yang terbentuk mengenai bagan atas penomoran angka merupakan aktivitas yang terbentuk, panah (1) negara memiliki kepentingan atas pengelolaan kawasan Teluk Benoa bahwa baik dalam melakukan reklamasi atas urgensi kerusakan dan memaksimalkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan strategis untuk pemanfaatan ekonomi. Dimana, negara dalam hal ini direpresentasikan dalam bentuk rezim SBY ditingkat pusat dan I Made Mangku Pastika ditingkat daerah sebagai pemilik kewenangan atas mekanisme berjalannya desentralisasi sekaligus kepanjangan tangan dari pusat. Atas kedua aktor tersebut penulis melihat adanya pola yang menunjukkan kehadiran negara dalam proyek reklamasi Teluk Benoa sendiri terutama atas pemberian hak pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan pada satu pihak yakni PT TWBI. (2) Pembukaan atas ruang pemanfaatan pengelolaan kawasan ekonomi yakni Teluk Benoa, membuka *chance* bagi banyak pihak swasta untuk ambil bagian dalam pengelolaan tersebut. Namun, keterlibatan banyak pihak

swasta tersebut tak lantas menjadi sebuah kompetisi seperti yang dibayangkan dalam mekanisme berjalannya kapitalisme, yakni bekerja secara dinamis tanpa adanya intervensi. (3) Demokrasi membuka ruang bagi masyarakat terlibat langsung baik mengenai penguatan maupun pelemahan *civil society* sebagai entitas dalam dinamika proses pengambilan keputusan. Namun, hal ini tak lantas langsung membawa dampak pada proses keputusannya terutama mengenai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat di Bali atas proyek reklamasi Teluk Benoa. Sehingga, perlu ditinjau kembali bagaimana resistensi ini mampu berjalan secara efektif dan memberikan *pressure* terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi khususnya di kawasan Teluk Benoa.

Selanjutnya, penjelasan mengenai penomoran menggunakan huruf merupakan dampak atas aktivitas proyek reklamasi Teluk Benoa yang dapat dijelaskan, sebagai berikut: (A) Proyek reklamasi ini berpotensi membuka sektor perekonomian baru, dimana negara mendapatkan keuntungan atas hal tersebut baik dari segi pengelolaan kawasan yang rusak maupun pendapatan dari pajak atas pengembangan kawasan pariwisata baru, serta penyediaan atas lapangan pekerjaan baru. Selain itu, kontribusi terbesar dan harus dibayar mahal atas rezim SBY berada pada proses politik yang didapatkan sebelum pemberian proyek kepada perusahaan, yakni keterlibatan dukungan moril dan materiil kepada calon rezim yang berkuasa. (B) PT TWBI mendapatkan keuntungan finansial dan investasi yang sangat besar, karena mendapatkan wilayah strategis nasional. Terlihat dari tersedianya infrastruktur bagi pengunjung domestik maupun mancanegara seperti Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Internasional Benoa, serta tersedianya akses pendukung yaitu jalan tol Bali Mandara. Serta, fasilitas pariwisata yang sudah tersedia dan menjadi destinasi utama pariwisata Bali, seperti Tanjung Benoa serta Nusa Dua. (C) Masyarakat Bali yang merupakan salah satu entitas dalam ekonomi politik, mendapatkan dampak secara langsung atas proyek reklamasi Teluk Benoa mulai dari kehilangan mata pencarian, tempat ibadah dan budaya, hingga tergesurnya entitas lokal tersebut sebagai konsekuensi atas adanya pariwisata serta pengembangan property di Teluk Benoa. Serta, kerusakan lingkungan yang akan berdampak luas

bagi masyarakat di sekitaran maupun Bali Selatan lebih luas atas kenaikan permukaan Teluk Benoa.

Lalu terkait dengan pola yang terbentuk, penulis ingin menjelaskan bahwa dalam proyek reklamasi ini akan muncul hubungan atas pola dalam gambar dengan penomoran. (1) Negara memiliki nilai tawar yang tinggi atas kepemilikan sumber daya alam yaitu Teluk Benoa. Kawasan Teluk Benoa sendiri memiliki potensi ekonomi yang kuat mengingat letaknya berada dalam Kawasan Strategis Nasional khususnya pada pengembangan pariwisata. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kawasan Teluk Benoa berakibat pada produktivitas teluk itu sendiri. Namun, disatu sisi negara tidak memiliki kekuatan finansial untuk membiayai proyek reklamasi sebagai alternatif pengelolaan Kawasan tersebut. Sehingga negara dalam hal ini membuka investasi untuk investor yang ditunjuk sebagai pengelola Proyek Reklamasi Teluk Benoa dan negara bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam proyek ini.

(2) Menunjukkan adanya keinginan PT.TWBI yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan perbaikan atas kondisi lingkungan yang ada di Teluk Benoa dengan cara reklamasi dan pengembangan Kawasan Teluk Benoa sebagai bentuk investasi. PT. TWBI memiliki beberapa catatan dan permintaan untuk negara dalam mengerjakan proyek reklamasi. Negara selain bertindak sebagai fasilitator dan regulator, negara juga harus segera menjamin investasi yang dilakukan oleh PT.TWBI sebagai pengembang yang ditunjuk. (3) Masyarakat memang secara tidak langsung masuk dalam perdebatan ini karena masyarakat merupakan suatu individu independen dan terpisah dalam perdebatan ekonomi politik. Bahwa mereka melakukan aktivitas ekonomi di Kawasan Teluk Benoa memang benar, seperti menangkap ikan, mencari kerang, budidaya terumbu karang. Namun, dalam hal ini masyarakat tidak secara langsung resisten terhadap proyek reklamasi tersebut.

Lebih lanjut penulis juga akan menguraikan penjelasan mengenai pola dampak dari Proyek Reklamasi Teluk Benoa sendiri terhadap pihak yang terlibat dalam gambar dengan huruf. (A) Proyek reklamasi akan berdampak positif bagi kelangsungan negara jika proyek ini terealisasi. Negara mendapatkan keuntungan

secara langsung baik untuk perbaikan lingkungan yang rusak seperti banyak yang sudah dijelaskan oleh penelitian tentang kondisi alam Kawasan Teluk Benoa. Serta, pembangunan kawasan perekonomian sebagai peningkatan pendapatan negara, meningkatkan investasi, dan membuka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan kewajiban negara. (B) PT. TWBI yang ditunjuk sebagai pengembang dalam proyek reklamasi ini mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan untuk pengembangan kawasan perekonomian. Penulis melihat bahwa PT. TWBI mendapatkan beberapa *previllage* dari negara baik dalam proteksi atas investasi maupun tersedianya fasilitas infrastruktur penunjang. (C) Masyarakat mendapatkan dampak langsung karena mereka bersentuhan langsung atas aktivitas di Kawasan Teluk Benoa. Mulai dari kehilangan mata pencaharian mereka akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi sendiri ataupun atas terealisasinya reklamasi dengan membangun pusat perekonomian baru. Meskipun, juga nantinya akan berdampak positif seperti adanya penyerapan tenaga kerja atas proyek reklamasi yang dapat mensubstitusi mata pencaharian sebelumnya.

Dengan kondisi yang telah diuraikan penulis bahwa proyek reklamasi ini berorientasi ekonomi demi meningkatkan arus investasi guna meningkatkan akumulasi kapital dan pendapatan negara. Dimana dalam hal ini negara secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang mana jika meminjam kategorisasi keterlibatan negara menurut Tornquist (1990) memiliki dua dimensi. Pertama, negara sebagai aktor utama dalam pembangunan itu sendiri seperti menyiapkan infrastruktur, melakukan proses produksi dan distribusi sekaligus menyiapkan regulasi yang mendukung proses akumulasi kapital. Kedua, negara memiliki kepentingan pada investor dengan melakukan cara melindungi dan menghidupi para investor tersebut. Hal ini selanjutnya menjadi sebuah paradoks bahwa akan bermunculan aktor-aktor negara yang arbiter dan tidak netral. Sehingga prinsip pasar bebas tanpa adanya intervensi dari negara serta prinsip dinamis tidak dapat berjalan secara efisiensi. Penulis melihat, bahwa adanya kejanggalan kepentingan dan sebuah penyelewengan kekuasaan akibat kewenangan yang dimiliki. Perlu digarisbawahi kembali dalam konteks Indonesia,

negara dalam hal ini memiliki otonomi relative dan kebebasan dalam mengambil sikap meskipun bertentangan dengan keinginan para investor. Hal inilah yang kemudian dijadikan penulis untuk mendudukan kembali permasalahan dalam dua hal, yaitu:

1. Bagaimana beroperasinya praktek *Ersatz Capital* dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa?
2. Apa peran yang diambil oleh masing-masing pihak (Negara, Swasta, dan Masyarakat Sosial) dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem beroperasinya *Ersatz Capital* dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa.
2. Melihat seberapa jauh peran yang diambil oleh negara, swasta, dan masyarakat sosial pada praktek *Ersatz Capital* dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa?

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademis

- Memberikan kontribusi kajian dalam studi ekonomi politik tentang praktek ersatz kapitalisme dalam pembangunan proyek nasional dengan konteks kedaerahan di Indonesia, terutama di Bali yang masih memegang prinsip adat.
- Memperluas kajian ekonomi politik khas Indonesia di era pasca otoritarian.

#### 2. Manfaat Praktis

- Menjadi rujukan untuk kajian ekonomi politik baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pembangunan berdasar kepentingan bersama.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Kapitalisme

Konsepsi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kapitalisme memproduksi dirinya, sehingga dapat bekerja dan beradaptasi dengan lingkungan dimana dia berada. Bahwa konsepsi ini tidak bisa terlepas dari dua prinsip yaitu persaingan bebas dan dinamis. Yang tidak kalah penting bahwa efisiensi menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam prosesnya.

Kejadian perubahan di Inggris memunculkan sebuah pertanyaan yang begitu mendasar atas asal usul kapitalisme, bahwa sebenarnya darimana dia berasal. Karena pola-pola yang terbentuk di kota-kota dagang di Eropa Barat seperti Amsterdam, Venesia, Florence, Paris, seperti yang dipercayai kebanyakan ahli sejarah percaya dapat menjawab asal usul kapitalisme, tidak sama sekali menjawab secara keseluruhan. Namun, seorang pemikir politik yaitu Ellen Meiksins Wood menemukan kejadian di pedesaan Inggris, ia mempercayai bahwa kejadian itu dapat menjadi sebuah *trigger* untuk menemukan teka-teki mengenai asal-usul kapitalisme yang lebih lanjut dapat menjelaskan dalil pokok kapitalisme tersebut. Selanjutnya, seorang Wood mencoba mengurai kembali mengenai definisi asal mula kapitalisme yang diadopsi dari karya dua ahli sejarah Marxis. Robert Brenner, yang mengulas perubahan sistem feodalisme ke dalam sistem kapitalisme dan E.P. Thompson yang menulis mengenai kemunculan kelas pekerja di Inggris. Sehingga ketiganya memandang bahwa kapitalisme harus dipahami sebagai suatu fenomena yang tidak wajar, memiliki sesuatu yang khas dan sangat muda dalam sejarah peradaban manusia.

Konsep kapitalisme sendiri juga merupakan bagian dari sistem pasar, dimana sistem ini memiliki prinsip dasar yaitu berjalannya mekanisme pasar merupakan kehendak pasar atau dengan kata lain pasar meregulasi dirinya sendiri tanpa ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain (negara) (Levine 2015, 82-83). Asumsi dasar tersebut berangkat dari banyaknya ahli ekonomi pada saat itu yang mana memiliki kecenderungan untuk memahami mekanisme pasar melalui pemahaman utilitarian. Jika sistem pasar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan para pelaku di dalamnya, serta dapat menentukan secara jelas terkait

dengan kebutuhan sekaligus sarana pemenuhan kebutuhan itu sendiri tanpa harus ada pengaturan (secara politis), maka pasar dianggap telah berhasil dalam memenuhi tujuan manusia dan tujuan sosial. Selanjutnya, pasar dianggap dapat berjalan baik jika individu-individu yang terlibat dalam pasar bertindak aktif baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, serta adanya perputaran uang dan komoditas begitu seterusnya hingga memunculkan sebuah perputaran atau *sirkulasi* di dalam pasar tersebut (Levine 2015, 83).

Ada dua hal penting terkait dengan pasar, bahwa kegagalan beroperasinya sistem pasar sendiri memang mustahil terhindarkan. Namun, harus diketahui antara kegagalan pasar - kegagalan individu dalam pasar merupakan hal yang berbeda. Kegagalan pasar hanya berdampak pada penderitaan yang timbul pada individu per individu sebagai pelaku pasar, dimana penghasilan yang didapat tiap individu memang bisa menurun karena kondisi pasar, namun tidak mungkin sebagai satu kesatuan pasar (Levine 2015). Dengan kata lain, seperti yang dijelaskan oleh Ricardo (1951, 290) bahwa individu bisa jadi gagal untuk menemukan orang yang mau membeli barangnya akibat dari individu itu melakukan kesalahan dalam perhitungan maupun nasib buruk. Namun, secara keseluruhan mekanisme pasar tidak akan pernah gagal. Perlu dipahami bahwa kegagalan pasar perlu dipahami sebagai situasi karena terlalu banyak beredarnya barang yang dibutuhkan banyak orang tetapi sirkulasi uang kepada orang yang membutuhkan barang tidak berjalan.

Prinsip pasar meregulasi dirinya sendiri juga memunculkan masalah yang mendasar, seperti jika memang pasar dapat meregulasi dirinya sendiri, tingkat kepuasan yang dirasakan oleh tiap individu akibat mekanisme pasar itu bergantung pada bagaimana dan berapa jumlah barang yang dapat ia jual di pasar dimana hal ini hanya menguntungkan individu. Namun, yang perlu diketahui bahwa pasar juga memiliki fungsi dengan mendisiplinkan pelaku-pelaku yang mementingkan kepentingan pribadi agar mereka mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar yang lain. Perdebatan mengenai prinsip pasar yang meregulasi dirinya sendiri ini direspon oleh konsep Adam Smith (1937) dimana ia berangkat juga dari kritiknya kepada kebijakan pembatasan impor dari luar negeri.



Memang pada dasarnya hal ini menjadi sesuatu yang baik, karena negara berusaha memonopoli kegiatan ekonomi atau industri dengan berfokus memicu industri dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kapital untuk industri dalam negeri (Smith 1937, 420).

Argumentasi dari Smith adalah mengenai asumsi bahwa kekayaan masyarakat akan selalu berdampak secara penuh karena motivasi utama yang diincar adalah profitabilitas (Levine 2015, 92). Lalu, adanya masalah mengenai kegagalan pasar tidak akan terjadi jika kapital di dalam masyarakat dimanfaatkan dengan maksimal, seperti kasus pembatasan impor dari luar negeri dimana hal ini akan berdampak pada terbatasnya investasi masyarakat dalam industri - industri yang dilindungi saja. Jika dihubungkan dalam konteks pasar ini difungsikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan public, dapat dilihat dari bagaimana sebenarnya mekanisme pasar akan berjalan dengan normal tanpa adanya regulasi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan public. Karena perlu diketahui bahwa sistem pasar sendiri menjamin bahwa kapital yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai individu akan berorientasi pada sebuah profitabilitas. Dimana profitabilitas sendiri adalah sebuah tolak ukur untuk mengetahui kontribusi dari setiap kekayaan atau kapital yang dimiliki masyarakat.

Dengan kata lain, bahwa keputusan mengenai investasi terhadap kapital yang dimiliki masyarakat harus diserahkan kembali pada kapasitas individu sebagai pelaku pasar. Sehingga pada titik ini seorang Adam Smith menentang adanya regulasi dari kewenangan public atas sebuah investasi, karena nantinya hal ini akan berdampak pada sesuatu yang lain dari sistem pasar dan bukan lagi berorientasi pada profitabilitas. Lebih lanjut, Wood (2002) mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem politik-ekonomi yang secara kualitatif berbeda dan terpatah dari sistem-sistem sebelumnya. Selanjutnya, ia beranggapan bahwa kekayaan dan kapital tidak selalu memiliki hubungan satu sama lain. Karena kapitalisme sendiri bukan hanya mengenai akumulasi modal tetapi lebih dari itu, seperti adanya perubahan hubungan sosial yang mengarah pada 'daya gerak' kapitalisme itu sendiri, seperti: adanya paksaan untuk bersaing, memaksimalkan profit yang dimiliki, membuat suatu keharusan untuk menginvestasikan kembali

laba yang dimiliki, dan terus memaksimalkan produktivitas tenaga kerja sekaligus pengembangan produksi. (Wood 2002, 36-37) Dengan kata lain, kapitalisme sendiri sebenarnya ditandai oleh adanya perubahan hubungan sosial yang nantinya memaksa semua yang terlibat mengalami ketergantungan pada pasar. Dan perlu digarisbawahi ada tiga pola yang muncul, yaitu: proses produksi seluruhnya ditujukan untuk pasar, semua yang terlibat harus tunduk pada prinsip persaingan, dan motif untuk mencari laba menjadi sesuatu yang dominan dibanding motif melakukan proses produksi. Bahwa inilah yang dimaksud sebagai perbedaan kualitatif yang harus dipahami yang mana memunculkan satu titik mula definitive dan pola tertentu yang menandai substansi dari kapitalisme, sekaligus memiliki konsekuensi yaitu adanya titik akhir.

#### 1.5.2 *Crony Capitalists*

Dalam mekanisme berjalannya kapitalisme sendiri, menurut Yoshihara (1990) bahwa perkembangan kapitalisme yang terjadi pada negara – negara dunia ketiga berbeda dengan yang terjadi di Inggris. Perkembangan kapitalisme di Inggris terjadi dengan mekanisme prinsip liberal, dimana mereka memperjuangkan prinsip liberal ini di dalam negeri maupun dunia internasional. Karena mereka menolak mati – matian adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur sistem pasar. Lebih lagi mengenai prinsip persaingan bebas tersebut tidak boleh dilanggar, pemerintah hanya difungsikan sebagai wasit – bukan sebagai regulator, fasilitator, bahkan mengintervensi prinsip persaingan bebas dalam mekanisme pasar. Namun, apa yang terjadi di negara - negara dunia ketiga khusus Filipina dan Indonesia berbeda – bahwa kemunculan para kapitalis konco (*crony capitalists*) yang mendapatkan perlakuan khusus karena memiliki kedekatan dengan kepala negara menjadi sebuah perdebatan tersendiri atas prinsip pasar bebas dalam kapitalisme itu sendiri.

Kapitalis konco atau *crony capitalists* merupakan pengusaha sektor swasta yang memperoleh keuntungan akibat dari hubungan erat yang dibangun dengan kepala keluarga melalui cara mereka sendiri dalam mengembangkan hubungannya. Hal ini berangkat dari kondisi yang terjadi di Filipina bahwa

penciptaan undang -undang darurat untuk menyebutkan bahwa mereka (pengusaha sektor swasta) memperoleh keuntungan besar dari hubungan erat yang dijalin dengan Presiden Marcos. Berikut para kapitalis konco dari Presiden Marcos yang mendirikan bisnisnya sebelum undang – undang darurat, yakni Ricardo Silverio yang menjadi pengusaha di sektor perakitan dan distributor mobil – mobil Toyota, serta Rodolfo Cuenca yang merupakan pengusaha dibidang konstruksi (Construction and Development Corp. of the Philippines) (Kunio 1990, 97 - 100). Dengan dikeluarkannya undang – undang darurat tersebut berkonsekuensi pada semakin melesatnya usaha yang dimiliki oleh beberapa konco Presiden Marcos, serta memperluas kepentingan bisnis yang luar biasa.

Dalam konsepsi ini sendiri, ada dua hal yang harus dibedakan mengenai konco dengan para kapitalis yang memiliki koneksi yang bersifat umum dengan pemerintah (Kunio 1990, 99). Kategorisasi ini dapat didasarkan dengan relasi yang dibentuk dalam konteks kekuasaan ketika Presiden Marcos menjabat, serta hal ini akan bersinggungan langsung dengan apa yang didapatkan terkait dengan hak istimewa, seperti pemberian lisensi atau sumberdaya negara, pemberian proteksi, serta memberikan segala bentuk wewenang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam konteks di Filipina sendiri, atas berlakunya undang – undang darurat oleh Presiden Marcos berdampak pada beberapa aktivitas yang menguntungkan kepada “mereka” yang berkoneksi erat, karena Presiden Marcos mendapatkan kekuasaan jauh lebih besar dari masa sebelumnya, serta bersedia menggunakannya demi keuntungan ekonomi. Sedangkan, para kapitalis lainnya sendiri memang tidak jauh berbeda pada prinsipnya selama mereka memberikan keuntungan bagi Presiden Marcos. Namun, skala prioritas serta jika dihitung secara tingkatan bisa jauh lebih kecil daripada yang memiliki koneksi erat dengan Presiden Marcos.

Praktek ini juga terjadi dalam konteks Indonesia yakni era Orde Baru, dimana Presiden Soeharto ketika pada akhir tahun 1956 ketika memimpin Divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Pada saat itu Soeharto memberikan kepercayaan dan kerjasama dalam hubungan bisnis dengan Liem Sioe Liong yang berlanjut hingga menjadi presiden. Dimana, hal ini berdampak pada apa yang diperoleh oleh Liem

atas sejumlah monopoli dan pemberian hak – hak istimewa dari pemerintah. Sehingga, ketika praktek ini terus berjalan akan berdampak pada terus berkembangnya bisnis hingga bermuara pada kerjaan bisnis yang besar serta kepemilikan saham pada beberapa sektor, seperti: perbankan (BCA), semen (Indocement), pengolahan tepung (Bogasari), makanan (Indofood), serta bidang perdagangan lainnya. Namun, pemberian perlakuan istimewa ini juga harus dibayar mahal oleh Liem dengan memberikan imbalan berupa saham dan sumbangan untuk yayasan – yayasan yang dinaungi oleh Soeharto.

### 1.5.3 Investasi

Istilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal, penulis meminjam definisi investasi menurut Kamarudin (2004) yaitu sebuah akumulasi atas asset yang dimiliki dengan berharap mendapatkan tambahan atau keuntungan di masa selanjutnya. Tahun 1950 negara Indonesia mulai mengambil peran dalam kepemilikan dan akumulasi kapital yang mana hal ini dilakukan sebagai reaksi untuk menasionalisasikan perusahaan Belanda (Hiariej 2006, 94-95). Namun, kinerja buruk Orde Baru menandai kegagalan dominasi perusahaan negara pada revolusi 1965. Hal ini berkonsekuensi langsung pada bergantungnya negara pada modal asing dan bantuan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) (Hill 2000). Selain, itu investasi di Indonesia juga sebagai akibat dari potensi yang dimiliki Indonesia begitu besar mulai dari sumberdaya alam hingga sumber daya manusia yang melimpah. Namun, investasi itu tak lantas begitu saja mudah masuk ke Indonesia, negara membuat regulasi mengenai penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya tertuang juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal.

Menurut Yoshihara Kunio (1990) pola investasi dapat dikategorikan dalam tiga cara beroperasinya pada sebuah kawasan, yaitu: bersifat horizontal, vertikal, dan konglomerat. Pola investasi horizontal dapat didefinisikan sebagai sebuah investasi oleh sebuah perusahaan asing pada daerah domisili dia

beroperasi, jenis investasi ini tidak terbatas pada perusahaan manufaktur (paling direkomendasikan) saja tetapi juga sampai menyentuh sektor primer. Pola investasi vertikal dapat didefinisikan sebagai bentuk investasi yang berfokus pada pendirian kantor penjualan, hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan induknya. Terakhir, pola investasi konglomerat dapat didefinisikan sebagai bentuk investasi yang dilakukan perusahaan dengan melakukan diversifikasi komoditas, dengan kata lain hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian pada satu bidang komoditas maka komoditas yang lain dapat menggantikan peran yang ada.

#### 1.5.4 Reklamasi

Perlu dipahami bahwa konsep reklamasi sendiri sering digunakan dalam pendekatan perencanaan kota sebagai langkah pemekaran kota. Reklamasi dilakukan sebagai alternatif negara atau kota besar yang dianggap memiliki kompleksitas permasalahan atas ketidaktersedian lahan sekaligus kerusakan lingkungan. Di sisi lain meningkatnya laju pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran (fertilitas) dan rendahnya angka kematian (mortalitas) serta migrasi besar-besaran yang menjadi tantangan selanjutnya. Selain itu, wilayah pesisir dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan memiliki kualitas lingkungan yang rendah jika tidak dilakukan pengelolaan. Sehingga memunculkan dua alternatif pilihan, pertama secara horizontal reklamasi dapat mengatasi permasalahan dengan membantuk daratan baru di daerah pesisir. Kedua, secara vertikal membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun atau apartemen.

Reklamasi menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 Butir 23 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Dengan kata lain, reklamasi akan menciptakan Kawasan baru yang

diperuntukkan sebagai Kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian serta obyek wisata. Secara umum bentuk reklamasi dibagi menjadi dua, yaitu reklamasi menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai dataran induk. Dan menurut Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005) sistem reklamasi dibagi menjadi empat. Yaitu: (1) *Sistem Timbunan*, dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut; (2) *Sistem Polder*, dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul ke darat untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi; (3) *Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan*, dilakukan setelah lahan diperoleh dengan metode pompa dan ditimbun hingga ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan permukaan air laut tidak besar; (4) *Sistem Drainase*, dilakukan pada wilayah pesisir yang datar dan relative rendah tetapi elevasi muka tanah lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

## 1.6 Kerangka Teoritik

### 1.6.1 Ersatz Kapitalisme

Dalam pemaknaan *Ersatz Capitalism*, seorang Yoshihara Kunio mencoba melakukan kontekstualisasi atas kapitalisme yang disepakati oleh kebanyakan para cendekiawan saat itu dengan berdasar mengenai definisi dan cara kerja atau *performance* oleh Fernand Braudel. Braudel (1984) berpendapat bahwa kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang monopoli yang selalu berada pada posisi untuk mendapatkan akumulasi keuntungan yang besar dengan meminimalisir resiko yang didapat, dan sebagian besar pembaharuan atas alat produksi dan berjalannya mekanisme pasar diproduksi oleh perekonomian pasar itu sendiri. Dengan kata lain, kehadiran modal asing atas dominasi dalam konteks Asia Tenggara dianggap sebagai munculnya ersatz sendiri, namun seiring berjalannya waktu modal asing di Asia Tenggara mulai mengalami penurunan akibat adanya perkembangan besar pada perekonomian Asia Tenggara. Kemudian, permasalahan yang diibaratkan atas kondisi di Asia Tenggara merupakan bagian dari ketidakmampuan kapitalisme ini sebagai pelopor

pembangunan ekonomi karena tidak memiliki kemampuan ekspor. Lebih lanjut, pendapat dari para ekonom *laissez – faire* merupakan kondisi *ersatz* yang diibaratkan adanya dominasi pemburu rente (*rent – seekers*). Dimana, hal ini berdampak pada munculnya jenis – jenis kapitalis yang dianggap sebagai sebuah kejanggalan seperti kapitalis konco (*crony capitalist*) dan kapitalis birokrat.

Jika diandaikan sebuah kerangka penguasaan ekonomi berdasar kepemilikannya dimiliki oleh pemimpin – pemimpin politik, anak – anak dan sanak keluarga mereka, dan keluarga – kraton terlibat dalam bisnis yang terbentuk didalamnya. Apa yang diincar mereka dalam proses kapitalisasi ini bukan hanya proteksi dan kompetisi asing, tetapi lebih dari itu menyangkut konsesi, lisensi, hak monopoli dan pemberian subsidi pemerintah. Apa yang disebutkan oleh Braudel mengenai keberadaan spekulator memang tersedia baginya dalam mekanisme pasar. Namun, yang menjadi catatan seorang Yoshihara Kunio adalah mekanisme beroperasinya para pemimpin bisnis yang mengejar keuntungan dalam waktu yang pendek dan cepat. Sehingga, berdampak pada timbulnya diversifikasi beberapa industri terutama pada bidang – bidang real estate dan non manufaktur. Atas dasar dinamika yang berkembang dalam berjalannya prinsip kapitalisme Yoshihara ingin menekankan bahwa seharusnya dalam kapitalisme dapat berjalan secara dinamis dimana lingkungan dia berada. Sehingga, hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada kondisi mengenai konsepsi ekonomi – politik pada akhir abad 18 yang pada saat itu.

Akhir abad 18 menandai sebuah pergolakan besar atas konsepsi ekonomi-politik global. Bahwa Adam Smith dan Steuart menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memulai memberikan pemaknaan dan signifikansi atas konsepsi ekonomi-politik. Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nation* menyatakan dengan tegas bahwa sistem politik yang diproduksi dalam suatu negara tidak akan berpengaruh apa-apa pada kehidupan masyarakat. Penyebabnya adalah pandangan secara emosional seorang Smith kepada para politisi yang disebutnya sebagai “hewan-hewan yang licik dan culas” (Smith 1937, 435). Dalam hal ini Smith berpandangan bahwa ada dua gagasan yang bisa dijadikan

alternatif untuk permasalahan yang berkembang dalam tatanan ekonomi yang nantinya terdiri dari dua bagian.

Pertama, kelompok yang bersifat non-politik (masyarakat sipil) harus mengatur dan mempertahankan kelangsungan hidupnya secara mandiri sekaligus tanpa menggunakan pengambilan keputusan politik (independen). Kedua, seperti dijelaskan oleh Steuart (1966) bahwa prinsip-prinsip dan kebutuhan dasar dari masyarakat sipil itu dapat mendominasi bidang politik. Lebih lanjut, bahwa prinsip-prinsip ekonomi dapat mengekang tindakan yang diambil oleh para politisi atau negarawan. Sehingga peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat akan mengekang dan berdampak pada fungsi para politisi atau negarawan yaitu hanya sebagai pengelola (*caretaker*). Yang lebih lanjut fungsi ini dapat digambarkan seperti menjalankan fungsi kehakiman dengan lebih menekankan pada pemberian perlindungan negara kepada hak-hak kepemilikan. Pemaknaan terkait dengan ekonomi-politik dalam pendekatan klasik sering kali merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi.

Kebutuhan pribadi sendiri memiliki beberapa irisan dimana mereka memiliki perbedaan makna namun mereka beroperasi bersama satu sama yang lain, adapun irisan tersebut yaitu: masyarakat sipil (*civil society*), ekonomi pasar (market economy), masyarakat borjuis (*bourgeois society*), kapitalisme, dan banyak lagi (Levine 2015, 76). Dari semua istilah yang ada hal ini tidak terlepas dari sebuah pola di masyarakat bahwa sistem ekonomi harus lebih mendominasi dibandingkan dengan sistem politiknya. Kemudian, masyarakat makin tumbuh dan berkembang dengan jumlah yang banyak serta terjadi penguatan, maka hal inilah nantinya yang akan melemahkan sistem politik tersebut. Meskipun pada awalnya sistem politik menaungi sistem ekonomi, hal inilah yang nantinya menjadi sebuah tantangan bagaimana mereka bekerja baik dari sistem politik maupun sistem ekonomi. Sehingga menjadi penting dilihat bahwa tantangan tersebut dalam prinsip-prinsipnya masing-masing dilihat dari sudut pandang kapitalisme, lebih lanjut lagi kapitalisme yang tidak bekerja secara dinamis.

Ersatz Kapitalisme – menurut Yoshihara Kunio, bahwa kapitalisme yang berkembang dalam lingkungan Asia Tenggara bukan merupakan kapitalisme yang



tulen (Kunio 1990). Dalam teori ini bahwa pemaknaan kata *Ersatz* yang diadopsi dari bahasa Jerman yang berarti “substitusi” atau “pengganti”. Namun berbeda ketika teori *Ersatz* dimaknakan dalam bahasa Inggris yakni “pengganti yang lebih inferior”. Dari keduanya Yoshihara mengasumsikan pemaknaan teori *Ersatz* sebagai bentuk kapitalisme ersatz sebagai kapitalisme substitusi yang lebih inferior. Selain itu, Yoshihara mengasumsikan bahwa ada kapitalisme yang tidak semu atau tulen yang menggejala di Eropa abad ke-19. Dimana kapitalisme berjalan secara dinamis yang berhasil membawa Eropa keluar dari sistem feodal menuju sistem kapitalis industri yang membawa dampak pada perkembangan kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar biasa.

Hal ini juga menggejala di Amerika Serikat, dan kemudian Jepang yang selanjutnya diikuti oleh keempat naga Asia, yakni : Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pendapat Yoshihara tentang kapitalisme semu Asia Tenggara bahwa perkembangan kapital tidak hanya sebatas pada sektor tersier. Bahwa pada sektor tersier belum tentu dilirik oleh modal asing ternyata kurang tepat. Kepemilikan perusahaan besar dalam sektor manufaktur memang hingga hari ini modal asing tidak menjadi sesuatu yang dominan. Kemudian, ada beberapa hal yang harus dilihat bahwa kapitalisme memiliki bentuk dan strategi yang berbeda – beda dalam memproduksi dirinya dalam perkembangan sepanjang sejarah. Pada dasarnya kepemilikan atas alat – alat produksi adalah milik pribadi, lalu mengenai prinsip pasar digunakan sebagai sistem dasar dalam melakukan pertukaran barang dan jasa, serta tenaga kerja yang menjadi komoditi yang diperjual – belikan di pasar.

Tetapi dalam kasus di Singapura dan Malaysia misalnya, bahwa kekuatan modal asing menjadi masih mendominasi sektor industri. Dalam hal ini dapat dijelaskan kedua negara ini tidak bisa menjadi pelopor pembangunan ekonomi, karena keduanya tidak memiliki kemampuan ekspor. Sehingga, para kapitalisme industri yang besar menjadi bagian dari kapitalis komprador (bertindak hanya sebagai agen dari produsen asing di negeri mereka sendiri), dengan kata lain para kapitalis industri besar ini bergantung atas teknologi asing yang lebih lanjut dapat diartikan atau mereka dianggap tidak cukup efisien untuk bersaing di pasar

internasional. Dan perlu digarisbawahi bahwa pengertian dinamisme yang muncul merujuk pada pengertian perekonomian pasar bukan kapitalisme.

Ada dua hal yang menjadi kritik utama seorang Yoshihara (1990: 2) terkait dengan praktek ersatz kapitalisme dalam kontek Asia Tenggara, adapun hal tersebut yaitu:

1. Campur tangan pemerintah dianggap terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip dasar pasar yaitu persaingan bebas dan berdampak pada dinamika kapitalisme yang tidak dinamis.
2. Kapitalisme yang berkembang tidak diimbangi oleh kemajuan teknologi atau bisa dikatakan tidak memiliki teknologi yang memadai.

Sehingga keduanya secara tidak langsung memunculkan konsekuensi logis atas dua hal tersebut. Pertama, bahwa campur tangan yang terlalu besar mengakibatkan munculnya pemburu rente dalam kalangan birokrat pemerintah, yang selanjutnya berdampak pada tidak bisa memunculkan pengusaha sesuai dengan definisi ekonomi dan pasar. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Inggris kaum borjuasi memiliki kemampuan untuk berusaha mendekati pemerintah dengan harapan bahwa pemerintah mencampuri sistem pasar dan bermuara pada monopoli kapital dan pasar. Sehingga, hal ini menjadikan para birokrat yang ada dalam pemerintah ikut campur dalam sistem pasar dan menciptakan kapitalisme rente (Kunio 1990). Selain itu, dalam perkembangan kesejarahan dimana keturunan Cina dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas khusus dan pendukung untuk menunjang berjalannya usaha tersebut. Kedua, Yoshihara melihat bahwa Industrialisasi menjadi hal utama dalam pembangunan ekonomi bahwa perubahan paradigma terkait dengan investasi harus menjadi fokus utama dalam sebuah perekonomian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat bersaing dengan lainnya. Sehingga mutlak bahwa teknologi menjadi alat pendukung dalam penentu berkembangnya kapitalisme itu sendiri.

Namun, sebenarnya Yoshihara (1990: 3) sendiri melihat sebenarnya problem tersebut bukan menjadi yang harus ditakuti karena dapat menghambat kinerja kapitalisme itu sendiri. Ada hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki

kualitas dari kapitalisme itu sendiri berupa terapi yang dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

1. Memperbaiki kualitas ikut campur-tangan pemerintah dalam sektor ekonomi
2. Meningkatkan kapasitas teknologi, sebagai alat pendukung dalam memperlancar proses industrialisasi.

Terapi ini dilakukan dengan harapan bahwa nantinya ada hal yang dapat diperbaiki setidaknya dalam memberi batasan-batasan pada pemerintah dalam ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Pertama, yang harus menjadi fokus bahwa sebenarnya Yoshihara secara pribadi tidak menyetujui sistem ekonomi liberal bahwa dalam konteks Jepang campur tangan pemerintah menjadi hal yang menjadi faktor penentu dalam pembangunan industri dan pertumbuhan di sektor ekonomi, bahwa yang ditekankan adalah pada perbaikan kualitas campur tangan pemerintah tidak menghilangkan peran pemerintah. Kedua, pengembangan pendidikan dan riset pada bidang sains dan teknologi menjadi sebuah keharusan dan harus dapat mendominasi daripada Pendidikan humaniora dan ilmu sosial.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini penulis pilih karena mempertimbangkan kedalaman data sekaligus eksplorasi secara mendetail. Hal ini tidak didapatkan pada metode penelitian kuantitatif yang hanya melakukan generalisasi dan membuat suatu prediksi-prediksi tertentu atas beberapa premis. Penulis meminjam definisi metode penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan (1984, 5) yang diartikan sebagai penelitian yang memiliki *output* data deskriptif – yang direduksi dalam tiga aspek data yaitu: perkataan atau lisan, berbentuk tulisan, dan tingkah laku manusia yang didapatkan dari orang-orang yang menjadi obyek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memenuhi kaedah metode penelitiannya sebagai kualitatif. Pertama, merupakan penelitian yang kompleks, sensitive, tidak dapat disimplifikasikan dengan angka, dan memiliki keterkaitan dengan interaksi dan proses sosial. Kedua, objek dan fokus

penelitian memiliki sifat mikro dan relative sedikit jumlahnya. Ketiga, tujuan penelitian merupakan awal dari sebuah penelitian atau merupakan penelitian pendahuluan (Hendrarso 2005, 170).

Penelitian dengan judul “Kronisme Kapital dalam Investasi Proyek Reklamasi Teluk Benoa” ini memiliki fokus pembahasan agenda kapitalisme dan hambatannya dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Dengan menggunakan analisa ekonomi-politik di Indonesia untuk melihat kembali bagaimana hambatan yang dialami swasta dalam berinvestasi pasca otoritarian sebagai bentuk beroperasinya kapitalisme. Kapitalisme di Indonesia beroperasi dengan memanfaatkan akses negara sebagai permintaan untuk penyediaan infrastruktur dan alat pendukung lainnya. Namun, negara juga tidak bisa lepas dari berperan besar sebagai *regulator* yang nantinya berkonsekuensi pada mekanisme beroperasinya kapitalisme itu sendiri. Sehingga hal ini dilihat sebagai sebuah tantangan atas beroperasinya kapitalisme di Indonesia khususnya pasca otoritarian. Keputusan politik yang dibuat dalam proyek reklamasi Teluk Benoa bertujuan untuk memecah konsentrasi kepadatan pariwisata khususnya di Bali selatan khususnya di Badung dan Denpasar. Dimana selanjutnya penulis akan membatasi dan fokus pada bagaimana agenda kapitalisme ini dapat terhambat dalam investasi di Indonesia. Melihat bahwa sebenarnya dalam proyek ini sendiri segala infrastruktur pendukung sudah tersedia seperti Jalan Tol Laut Bali Mandara, Pelabuhan Benoa, Bandara Ngurah Rai dan segala fasilitas perhotelan sekaligus wisata air yang sudah tersedia di Badung dan Denpasar.

### 1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Di mana, penulis memilih penelitian tipe deskriptif dikarenakan penulis memiliki kewajiban untuk menemukan dan menginterpretasikan suatu fenomena sosial khususnya berkaitan dengan gejala sosial mengenai hubungan sosial yang terjadi sebagai rangkaian dari sebab akibat, serta penulis memiliki kewajiban untuk menggambarkan pola situasi dan setting yang sosial-politik yang berkembang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Neuman, dimana penelitian dengan tipe deskriptif harus

mengandung unsur yaitu uraian detail penelitian mengenai situasi, setting sosial, serta hubungan sebab akibat dari kondisi sosial tersebut secara rinci (Neuman, 1994: 18-20). Sehingga pada tipe deskriptif sendiri objek penelitian akan berkembang dengan apa adanya, selain itu kondisi objek penelitian tidak dimanipulasi oleh penulis serta kehadiran penulis dalam penelitian ini tidak akan merubah objek dan dinamika pada sebuah penelitian (Sugiyono, 2010: 15).

### 1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bali khususnya di Teluk Benoa dan sekitarnya. Pemilihan lokasi di Bali merupakan sesuatu hal yang dilihat penulis ketika melakukan kuliah lapangan “Politik di Kota” pada tahun 2017. Saat itu penulis melihat banyak sekali banner maupun baliho yang memperlihatkan sikap penolakan masyarakat Bali terhadap Proyek Reklamasi Teluk Benoa. Dimana hal itu dilakukan sebagai bentuk dinamika sosial yang terjadi di Bali khususnya daerah Badung, Sanur, dan Denpasar sekaligus Bali Selatan. Selain itu, adanya ketertarikan penulis terhadap pengembangan pariwisata di Bali cenderung berbeda dan memiliki karakteristik budaya yang tidak dimiliki daerah lain – karena dalam pembangunannya masyarakat Bali selalu berprinsip pada *Tri Hita Karana* sebagai filosofi hidup. Selain itu, adanya awig-awig yang selalu dipegang erat oleh masyarakat adat Bali menjadi acuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di Bali.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua golongan data berdasar sumber yaitu primer dan sekunder sebagai pemenuhan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana data primer merupakan data yang didapat langsung dari aktivitas dan interaksi antara peneliti dengan subyek penelitian (narasumber). Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari lembaga atau institusi sekaligus badan statistic yang berkaitan dengan penelitian (Sudarso 2005, 55-56). Penelitian ini lebih lanjut akan dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi atau pengamatan,

wawancara mendalam, kepada subyek penelitian yang telah ditentukan, serta kajian literatur, berupa beberapa data dari kumpulan dokumen, buku, jurnal dan situs internet. Dalam proses wawancara menggunakan media langsung tatap muka maupun dengan perantara media seperti telfon dan media sosial serta email.

Terkait dengan observasi atau pengamatan dilakukan agar dapat melakukan gambaran secara deskripsi dengan sistematis mengenai sebuah fenomena dan tingkah laku dalam setting sosial-politik pada objek penelitian (Marshall & Rossman, 1989: 79). Selanjutnya, dalam wawancara sendiri menurut Harrison (2001: 91) bahwa kegiatan ini dilakukan dalam sebuah pertemuan yang bersifat relasional dimana melibatkan peneliti dan narasumber, dan dalam pertemuan tersebut terkait hasil jawaban yang diungkapkan oleh narasumber di dalamnya memuat data mentah yang nantinya digunakan penulis sebagai bahan analisa. Adapun terkait dengan kajian literatur sendiri penulis juga menggunakan data ini untuk memperkaya penelitian dan analisa. Data yang didapatkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, berita dan laporan dari berbagai organisasi nasional maupun internasional, baik dalam media cetak maupun media online (Harrison, 2001: 106-107).

#### 1.7.5 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan subjek penelitian atau informan dari kalangan praktisi, akademisi, serta masyarakat. Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan kedalaman informasi dan melihat bagaimana pola yang terbentuk atas proyek reklamasi Teluk Benoa. Sehingga, atas informasi dan penjelasan yang didapatkan penulis berharap mendapatkan gambaran utuh sebagai kebutuhan untuk melakukan eksplorasi dengan temuan data lain serta kontekstualisasi dengan teori dan konsep. Adapun subjek penelitian penulis, sebagai berikut

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian	Peran	Sasaran Data
I Nyoman Sugita sebagai Pengusaha Hotel Lokal di	Masyarakat	Menjelaskan mengenai dinamika

kawasan Tanjung Benoa.		pembangunan hotel di Bali, terutama semakin banyaknya investor dari luar Bali yang juga ikut andil.
Wayan Karloka sebagai <i>Managing Director Indonesian Tourism</i> (ITDC) Nusa Dua.	Negara	Memberikan gambaran umum perkembangan industri pariwisata khususnya di Bali Selatan.
Marketing PT TWBI.	Swasta	Menjelaskan berbagai aktivitas yang dilakukan PT TWBI berkaitan dengan reklamasi maupun tantangan yang dihadapi
Wilis Aji sebagai <i>Vice President Corporate Communication</i> PT Pelindo III Benoa.	Negara	Memberikan penjelasan terkait dengan proses reklamasi Pelabuhan Benoa serta proses berjalannya.
I Wayan Wiasthana Ika Putra sebagai Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali.	Negara	Mendefinisikan keinginan pemerintah dalam proyek reklamasi Teluk Benoa.
Ketut Tama Tanaya sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali fraksi PDIP Perjuangan.	Masyarakat	Sebagai pihak diluar lembaga pemerintahan, yang dapat menjelaskan dinamika kepentingan reklamasi Teluk Benoa.
I Made Juli Untung Pratama sebagai Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali.	Masyarakat	Memberikan penjelasan atas proyek reklamasi dari sudut pandang lingkungan dan dinamika politik dari sudut pandang

		lembaga swadaya masyarakat.
M. Ali Azhar sebagai Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Udayana	Akademisi	Memberikan pengantar mengenai industri pariwisata Bali serta pengalaman – pengalaman pembangunan yang ada di Bali.
I Wayan Patut sebagai Founder Komunitas Karya Segara di Pulau Serangan dan Salah Seorang Pegawai PT BTID.	Masyarakat	Menjelaskan proses dinamika di Pulau Serangan yang nantinya akan penulis gunakan sebagai komparasi terhadap proyek reklamas sebelumnya di Bali.
Ketut sebagai Masyarakat Adat Tanjung Benoa, Made Cahyana sebagai Pemuda yang Tergabung dalam <i>Sekeha Teruna – Teruni</i> atau Muda – Mudi Bali I Kadek Duarsa sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Benoa.	Masyarakat	Menjelaskan filosofi kehidupan masyarakat Bali dari dua sudut pandang yaitu kaum muda dan kaum tua
Nyoman sebagai Nelayan di Kawasan Teluk Benoa	Masyarakat	Memberikan gambaran perekonomian masyarakat lokal khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dan keluarganya.

#### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif sendiri dalam proses pengolahan data tidak harus saat setelah data terkumpul, atau hal yang berkaitan juga mengenai analisa data tidak mutlak bergantung pada pengolahan data yang sudah selesai (Hendrarso 2005, 172). Pada prinsipnya penelitian kualitatif bersifat tidak terlalu kaku, dimana



ketika terkumpul data sementara peneliti bisa langsung mengolah dan melakukan analisa data secara bersamaan. Dan sebaliknya ketika pada proses analisa data, peneliti dapat kembali ke lapangan jika membutuhkan sekaligus memperoleh tambahan data yang dianggap masih kurang atau perlu dan nantinya diolah kembali. Pada prinsipnya mengenai penelitian kualitatif sendiri data bersifat menyesuaikan dengan data yang ada. Namun, perlu dipahami juga bahwa ada mekanisme tahapan yang dapat digunakan sebagai langkah dalam menganalisa juga seperti juga yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2007) bahwa ada empat tahapan dalam proses analisa, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.